

**IMPLEMENTASI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DITINJAU
DARI KONSEP VALUE FOR MONEY DAN PENDEKATAN KEMANDIRIAN
(STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN
2017 – 2021)**

Muhammad Naufal Dhermawan

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

naufaldhermawan@gmail.com

Maulidah Narastri SE., MA

maulidah@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the performance of the Probolinggo Regency Government in 2017 to 2021 using the value for money method and the independence approach.

This type of research is a case study. The data analysis method used is a qualitative analysis method. Data collection techniques used are document studies and interviews. Data analysis techniques using Economic Ratios, Efficiency Ratios, Effectiveness Ratios, and Independence Ratios. The results of this study show that during 2017 to 2021 the Economic Ratio analysis is worth 88.93%, 91.86%, 91.22%, 89.52%, 88.96% indicating a fairly good performance. The Efficiency Ratio has an average value of 80.54% indicating that it is quite efficient. The Effectiveness Ratio has an average value of 100.38% indicating a very effective performance. The Independence Ratio has an average value below 25% which means that the role of the Central Government is very dominant than the Regions. The conclusion is that the financial performance of the Probolinggo Regency Government shows a performance that is quite economical, quite efficient, very effective, and independent which still depends on the central government.

This study aims to determine the performance of the Probolinggo Regency Government in 2017 to 2021 using the value for money method and the independence approach. This type of research is a case study. The data analysis method used is a qualitative analysis method. Data collection techniques used are document studies and interviews. Data analysis techniques using Economic Ratios, Efficiency Ratios, Effectiveness Ratios, and Independence Ratios. The results of this study show that during 2017 to 2021

the Economic Ratio analysis is worth 88.93%, 91.86%, 91.22%, 89.52%, 88.96% indicating a fairly good performance. The Efficiency Ratio has an average value of 80.54% indicating that it is quite efficient. The Effectiveness Ratio has an average value of 100.38% indicating a very effective performance. The Independence Ratio has an average value below 25% which means that the role of the Central Government is very dominant than the Regions. The conclusion is that the financial performance of the Probolinggo Regency Government shows a performance that is quite economical, quite efficient, very effective, and independent which still depends on the central government.

Keywords: value for money, economical, efficiency, effectiveness, independence.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masyarakat yang semakin aktif mengkritisi pelayanan dari pemerintahan. Masyarakat menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas oleh lembaga-lembaga sektor publik. Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu cara untuk menilai akuntabilitas organisasi sektor public dalam menghasilkan pelayanan publik. Pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya daerah serta semua potensi daerah yang ada agar dapat terciptanya kemandirian pemerintah daerah supaya tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat dan dapat menciptakan keuangan daerah yang ekonomis, efesiensi, dan efektivitas pada keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik Mardiasmo (2002:2).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangan. Untuk melihat gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah yang disajikan dalam laporan keuangan, perlu adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah merupakan bagian dari Pengukuran kinerja keuangan sektor publik yang merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2018:151).

Value For Money

Value for money menurut Mardiasmo (2009:4) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Dalam kaitan dengan penganggaran prinsip ini digunakan untuk belanja yang dilakukan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Dan Pemerintah Daerah dituntut semaksimal mungkin dalam membelanjakan anggaran sehingga tidak terjadi defisit anggaran yang ditetapkan, serta mendahulukan kegiatan prioritas dan mengacu pada peraturan yang berlaku sehingga ekonomis, efisien dan efektif bisa tercapai. Beberapa hal memang sulit untuk diukur, tidak berwujud dan bersifat subyektif sehingga sering disalahartikan karena itu dibutuhkan pertimbangan yang matang dalam menentukan apakah prinsip value for money telah diterapkan dan dicapai dengan baik.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim, 2007:232).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo kemudian diolah dan dianalisis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio ekonomis, rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio kemandirian. Metode dan Pendekatan tersebut bertujuan untuk menganalisis konsep *value for money* (rasio ekonomis, rasio efisiensi, rasio efektivitas) dan kemandirian guna untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017-2021.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian dilakukan pada bulan September 2021 - Juni 2022.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang dimana peneliti memperoleh sumber

data secara langsung melalui pihak pertama maupun secara tidak langsung melalui perantara, data yang diambil dari pihak lain atau yang sudah diolah pihak kedua. Sumber data primer diperoleh dari Tenaga Akuntan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo dan sumber data sekunder yang digunakan adalah laporan APBD dan laporan RAPBD.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara :

1. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan data yang didapat dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo berupa Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).
2. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara tidak terstruktur, wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait data yang diperoleh.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dalam bentuk studi kasus yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Analisis kinerja keuangan daerah diukur melalui konsep *value for money* (rasio ekonomis, rasio efisiensi, rasio efektivitas) dan perhitungan rasio kemandirian.

Teknik Analisis Data

Analisis Value For Money

Rasio Ekonomis

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian :

Tabel 3.1
Penilaian Tingkat Ekonomis Keuangan Daerah

Ekonomis Keuangan Daerah dan Kemampuan Otonom	Kriteria (%)
Tidak Ekonomis	>100
Kurang Ekonomis	>90-100
Cukup Ekonomis	>80-90
Ekonomis	>60-80
Sangat Ekonomis	≤60

Sumber: (Mardiasmo:2009)

Ekonomis berkaitan dengan pemerolehan input dengan kualitas tertentu dengan harga terendah. Pengukuran ekonomis melalui rasio antara masukan actual dengan yang direncanakan. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan ekonomis bila rasionya kurang dari 1 atau dibawah 100%, semakin kecil rasio ekonomis berarti rasio kinerja akan semakin baik.

Rasio Efisiensi

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Realisasi\ Belanja}{Realisasi\ Pendapatan} \times 100\%$$

Kriteria penilaian :

Tabel 3.2
Penilaian Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi Keuangan Daerah dan Kemampuan Otonom	Rasio Efisiensi (%)
Sangat Efisien	≤60
Efisien	>60-80
Cukup Efisien	>80-90
Kurang Efisien	>90-100
Tidak Efisien	≥100

Sumber: (Mardiasmo:2009)

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan realisasi anggaran belanja. Kinerja pemerintah daerah akan dikatakan efisien bila rasionya kurang dari 1 atau dibawah 100%, semakin kecil rasio efesiensi maka rasio kinerja kan semakin baik.

Rasio Efektivitas

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} \times 100\%$$

Kriteria penilaian :

Tabel 3.3
Penilaian Tingkat Efektivitas Keuangan Daerah

Efektivitas Keuangan Daerah dan Kemampuan Otonom	Rasio Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup Efektif	>80-90
Kurang Efektif	>60-80
Tidak Efektif	≤60

Sumber: (Mardiasmo:2009)

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Dikatakan sangat efektif jika rasio yang dicapai lebih dari 1 atau 100%, namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik.

Analisis Kemandirian

$$Rasio\ Kemandirian = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Pendapatan\ Transfer\ (Bantuan\ Pusan\ Provinsi\ dan\ Pinjaman)} \times 100\%$$

Kriteria penilaian :

Tabel 3.4
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan
Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Abdul Halim (2007:169)

- a. Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder berupa Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LAPBD) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021). Penelitian ini akan mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan empat elemen yang diteliti yaitu rasio ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan kemandirian. Berikut analisis data yang digunakan pada masing-masing elemen :

Analisis Rasio Ekonomis

Hasil dari perhitungan analisis rasio ekonomis dari laporan keuangan Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Analisis Rasio Ekonomis

Tahun	Rasio Ekonomis		Persentase (%)	Rasio
	Realisasi Pengeluaran	Anggaran Pengeluaran		
2017	1.725.954.320.819,00	1.940.742.299.092,98	88,93%	Cukup Ekonomis
2018	1.716.184.037.156,32	1.868.360.218.976,72	91,86%	Kurang Ekonomis
2019	1.865.212.554.504,60	2.044.660.618.291,83	91,22%	Kurang Ekonomis
2020	1.725.960.238.038,71	1.928.106.498.030,74	89,52%	Cukup Ekonomis
2021	2.263.637.087.068,78	2.544.612.584.503,00	88,96%	Cukup Ekonomis

Analisis Rasio Efisiensi

Hasil dari perhitungan analisis rasio efisiensi dari laporan keuangan Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2 Analisis Rasio Efisiensi

Tahun	Rasio Efisiensi		Persentase (%)	Rasio
	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan		
2017	1.703.003.320.819,00	2.109.237.164.702,70	80,74%	Cukup Efisien
2018	1.711.388.512.156,32	2.186.552.597.531,55	78,27%	Efisien
2019	1.858.960.054.504,60	2.405.134.988.058,74	77,29%	Efisien
2020	1.707.922.238.038,71	2.331.513.790.016,76	73,25%	Efisien
2021	2.234.945.553.137,78	2.399.817.125.466,09	93,13%	Kurang Efisien

Analisis Rasio Efektivitas

Hasil dari perhitungan analisis rasio efektivitas dari laporan keuangan Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.3 Analisis Rasio Efektivitas

Tahun	Rasio Efektivitas		Persentase (%)	Rasio
	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan		
2017	2.109.237.164.702,70	2.147.336.906.798,00	98,23%	Efektif
2018	2.186.552.597.531,55	2.150.613.638.624,38	101,67%	Sangat Efektif
2019	2.405.134.988.058,74	2.409.989.818.413,00	99,80%	Efektif
2020	2.331.513.790.016,76	2.336.621.884.218,30	99,78%	Sangat Efektif
2021	2.399.817.125.466,09	2.343.395.502.546,00	102,41%	Sangat Efektif

Analisis Rasio Kemandirian

Hasil dari perhitungan analisis rasio kemandirian dari laporan keuangan Kabupaten Probolinggo untuk tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Analisis Rasio Kemandirian

Tahun	Rasio Kemandirian		Persentase (%)	Pola Hubungan
	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer (Bantuan Pusat Provinsi dan Pinjaman)		
2017	302.046.061.275,70	1.749.072.088.377,00	17,27%	Instruktif
2018	234.692.177.915,55	1.853.937.139.616,00	12,66%	Instruktif
2019	245.431.703.862,63	2.059.435.195.814,00	11,92%	Instruktif
2020	254.884.191.561,70	1.952.569.330.698,00	13,05%	Instruktif
2021	300.398.775.730,94	2.003.576.092.440,14	14,99%	Instruktif

Pembahasan Hasil Temuan Penelitian

Analisis Rasio Ekonomis

Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomis menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo secara umum menunjukkan Cukup Ekonomis. Hal ini dapat dilihat pada 5 tahun terakhir, pada tahun 2017, 2020, 2021 menunjukkan nilai cukup ekonomis dan pada tahun 2018, 2019 menunjukkan nilai kurang ekonomis.

Pada tahun 2017 rasio ekonomis Pemerintah Kabupaten Probolinggo memperoleh hasil sebesar 88,93% sehingga dapat dikatakan Cukup Ekonomis dengan dapat melakukan penghematan dana sebesar Rp. 214.787.978.273,98 artinya Pemerintah Kabupaten Probolinggo cukup ekonomis dalam melakukan pengelolaan keuangan dan anggaran dengan baik.

Pada tahun 2018 rasio ekonomis Pemerintahan Kabupaten Probolinggo meningkat dengan memperoleh hasil sebesar 91,86% sehingga dapat dikatakan rasio pada tahun ini Kurang Ekonomis dengan dapat melakukan penghematan dana sebesar Rp. 152.176.181.820,40 hasil ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2017 artinya Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018 kurang ekonomis dalam melakukan pengelolaan keuangan dan anggaran dengan baik.

Pada tahun 2019 rasio ekonomis Pemerintah Kabupaten Probolinggo menurun dari tahun sebelumnya dengan penurunan yang tidak terlalu signifikan menjadi sebesar 91,22% yang dapat dikatakan rasio pada tahun ini masih Kurang Ekonomis dengan dapat melakukan penghematan dana sebesar Rp. 179.448.063.787,23 hasil ini lebih besar bila dibandingkan dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 rasio ekonomis Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 89,52% hingga dapat dikatakan Cukup Ekonomis dengan dapat melakukan penghematan dana sebesar Rp. 202.146.259.992,03 artinya Pemerintah Kabupaten Probolinggo cukup ekonomis dalam melakukan pengelolaan keuangan dan anggaran dengan baik.

Pada tahun 2021 rasio ekonomis Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan kembali dari tahun sebelumnya dari 89,52% menjadi sebesar 88,96% hingga dapat dikatakan Cukup Ekonomis dengan dapat melakukan penghematan dana sebesar Rp. 280.975.497.434,22 artinya Pemerintah Kabupaten Probolinggo cukup ekonomis dalam melakukan pengelolaan keuangan dan anggaran dengan baik.

Analisis Rasio Efisiensi

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo secara umum menunjukkan nilai cukup efisien dengan rata-rata 80,54% pada tahun 2017 sampai tahun 2021.

Pada tahun 2017 kinerja efisiensi Pemerintah Kabupaten Probolinggo menunjukkan nilai Cukup Efisien sebesar 80,74%, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 sebesar

78,27% (2018), 77,29% (2019), 73,25% (2020) hal ini dikarenakan adanya penurunan penggunaan anggaran belanja daerah pada tahun 2017 sampai 2020. Lalu pada tahun 2021 persentase rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengalami peningkatan sebesar 93,13% yang menunjukkan nilai kurang efisien dikarenakan adanya peningkatan yang cukup besar pada realisasi belanja daerah yang terjadi dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan dari uraian di atas Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat dinilai Cukup Efisien dikarenakan sudah cukup dalam berhemat dan membelanjakan pos-pos yang dibutuhkan, hal ini terlihat pada rata-rata 5 tahun terakhir yang tidak mencapai persentase 90%. Dengan rata-rata 5 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Probolinggo tergolong cukup efisien dalam mengelola anggaran keuangan mereka.

Analisis Rasio Efektivitas

Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dapat diketahui rasio efektivitas dari tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan nilai rata-rata 100,38% yaitu Sangat Efektif.

Hal ini dapat dilihat pada nilai yang dicapai pada tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2020 dengan nilai rasio efektivitas yang diperoleh yaitu sebesar 98,23%, 99,80%, dan 99,78% yakni tergolong efektif, lalu pada tahun 2018 dan tahun 2021 dengan nilai rasio efektivitas sebesar 101,67% dan 102,41%, persentase ini dinilai Sangat Efektif.

Meski tidak mencapai nilai maksimal pada tahun 2017, 2019, dan 2020 yaitu 100% tetapi kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan sangat efektif sesuai dengan penilaian rata-rata persentase yang diperoleh dari 5 tahun terakhir. Hal ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dan target yang ditetapkan dilakukan dengan sangat efektif.

Analisis Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dapat diketahui pada 5 tahun berturut-turut menunjukkan pola hubungan rasio Instruktif yakni sebesar 17,27% (2017), 12,66% (2018), 11,92% (2019), 13,05% (2020), 14,99% (2021). Persentase ini digolongkan kedalam pola hubungan Instruktif dikarenakan persentase pada 5 tahun terakhir berada pada rentang dibawah 25% yang berarti bahwa peran Pemerintah Pusat sangat dominan dari pada Daerah.

Hal ini disebabkan karena rendahnya Pendapatan Asli Daerah pada 5 tahun terakhir sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat bergantung dari pemerintah pusat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dengan metode *value for money* dan pendekatan kemandirian terhadap penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Rasio ekonomis pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo menunjukkan nilai rata-rata cukup ekonomis selama tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021 yang bernilai 88,93%, 91,86%, 91,22%, 89,52%, 88,96%. Sehingga untuk indikator rasio ekonomis Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mencapai kinerja yang cukup baik, karena dari tahun 2017-2021 telah berhasil mengelola penggunaan anggaran dengan cukup baik.
2. Rasio Efisiensi pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo menunjukkan nilai cukup efisien dengan rata-rata sebesar 80,54% pada tahun 2017 sampai 2021 yang artinya Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat dinilai Cukup Efisien dikarenakan sudah cukup dalam berhemat dan membelanjakan pos-pos yang dibutuhkan, hal ini terlihat pada rata-rata rasio pada 5 tahun terakhir.
3. Rasio Efektivitas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2017-2021 dengan rasio sebesar 98,23%, 101,67%, 99,80%, 99,78%, 102,41% menunjukkan nilai sangat efektif dengan rata-rata sebesar 100,38%. Kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan sangat efektif sesuai dengan penilaian rata-rata persentase yang diperoleh dari 5 tahun terakhir. Hal ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dan target yang ditetapkan dilakukan dengan sangat efektif.
4. Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dapat diketahui pada 5 tahun berturut-turut menunjukkan pola hubungan rasio Instruktif dikarenakan persentase pada 5 tahun terakhir berada pada rentang dibawah 25% yang berarti bahwa peran Pemerintah Pusat sangat dominan dari pada Daerah yang dimana dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat bergantung dari pemerintah pusat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka ada beberapa hal yang perlu dikemukakan sebagai saran, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebaiknya meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memperhatikan kembali tingkat ekonomis dan efisiensi dalam penggunaan

dana. Pemerintah harus mampu menekan realisasi atas anggaran yang ada agar tercipta kinerja keuangan daerah yang lebih baik pada tahun yang akan datang.

2. Untuk Pemerintahan Kabupaten Probolinggo sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Probolinggo terutama yang bersumber dari pajak, retribusi daerah, BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah agar pemerintah daerah tidak selalu bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat, dengan begitu ketergantungan pendapatan dari pemerintah pusat bisa semakin berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Indrayani, Khairunnisa. (2018). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value For Money Pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016), *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1-10
- Imelda Sari, Masagus Asaari, Ika Sefty Nurul Hidayah. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. 408-425
- Ibrahim, Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Organisasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. 533-548
- La Ode Abdul Wahab. (2017). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura*, 8(1), 1-14
- Abu Bakar, Sastra Widiyanti Said. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(2), 1-20
- Junita Putri Rajana Harahap, Murni Dahlena Nasution. (2019). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 9-14
- Putri Ariella Belinda, Nevi Costari. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, 1(1), 58-77
- Purwita, Dwi. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu). *E Jurnal Katalogis*, 5(3), 190-200
- Supina Sino, Titin Ruliana, Imam Nazarudin Latif, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Secretariat Kabupaten Kutai Barat. 1-7
- Khalikussabir. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas Pu Pengairan, Pu Binamarga Dan Pu Cipta Karya Kabupaten Probolinggo). *E-Jurnal Riset Manajemen*, 1-22
- Isna Ardila, Ayu Anindya Puti. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 78-85

- Ika Sasti Ferina,S.E.,M.Si.,Ak , Fika Arista. (2013). Penilaian Kinerja Dengan Menerapkan Indicator Value For Money Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2009-2011, Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya, 11(21), 33-50
- Fitriani. 2017. Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulu Kumba. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah: Makasar
- Wanda Novayanti. 2020. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014-2018 (Dengan Pendekatan Kemandirian Dan Konsep Value For Money). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas 17 Agustus 1945 : Surabaya
- Lilis Setiyawat. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2017-2019. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama: Tegal
- Yosie Dwinanda. 2018. Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma: Yogyakarta
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Bpkad Kabupaten Banjar. 2017. “Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah” , <https://Bpkad.Banjarkab.Go.Id/Index.Php/2017/08/08/Pengertian-Kemandirian-Kuangan-Daerah/> , Diakses Pada 20 Maret 2022 Pukul 11.23.
- Kumpulan Karya Tulis Ilmiah. 2016 . “Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah” ,<https://Tugasakhramik.Blogspot.Com/2016/05/Pengertian-Kemandirian-Kuangan-Daerah.Html>, Diakses Pada 20 Maret 2022 Pukul 11.25